

Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Negara Berkembang: *Systematic Literature Review*

Erfiani Lubis¹, Usiono²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: erfianilubis5@gmail.com¹, usiono@uinsu.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan inklusif di negara-negara berkembang melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis implementasi, tantangan, dan efektivitas kebijakan pendidikan inklusif dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Data diperoleh dari berbagai jurnal internasional yang terbit antara tahun 2015–2025 dengan kriteria seleksi berdasarkan relevansi topik, metodologi penelitian, serta hasil kebijakan yang diukur. Hasil telaah menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar negara berkembang telah memiliki regulasi yang mendukung pendidikan inklusif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur pendidikan yang belum memadai, serta kurangnya pelatihan bagi guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, faktor sosial dan budaya, termasuk stigma terhadap anak berkebutuhan khusus, turut menjadi penghambat utama keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Studi ini juga menyoroti pentingnya komitmen pemerintah dalam menyediakan pendanaan yang berkelanjutan, pengawasan kebijakan yang efektif, serta kolaborasi antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan model kebijakan berbasis konteks lokal agar pendidikan inklusif dapat berjalan secara berkelanjutan di negara berkembang.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan Inklusif, Negara Berkembang, Evaluasi Kebijakan, *Systematic Literature Review*, Implementasi Pendidikan

ABSTRACT

This study aims to promote inclusive education policies in developing countries through a Systematic Literature Review (SLR) approach. The main focus of this study is to analyze the implementation, challenges, and effectiveness of inclusive education policies in diverse social, economic, and cultural contexts. Data were obtained from various international journals published between 2015 and 2025, with selection criteria based on topic relevance, research methodology, and measured policy outcomes. The results of the review indicate that although most developing countries have regulations supporting inclusive education, their implementation still faces various obstacles, such as limited human resources, inadequate educational infrastructure, and lack of training for teachers in handling students with special needs. In addition, social and cultural factors, including stigma against children with special needs, are also major obstacles to the successful implementation of these policies. This study

also highlights the importance of government commitment to providing sustainable funding, effective policy oversight, and collaboration between educational institutions, communities, and non-governmental organizations. Based on the analysis, this study recommends strengthening institutional capacity and policy development models based on local contexts so that inclusive education can be implemented sustainably in developing countries.

Keywords: Inclusive Education Policy, Developing Countries, Policy Evaluation, Systematic Literature Review, Education Implementation

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan agenda global yang bertujuan memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), tanpa diskriminasi dan eksklusi dari sistem pendidikan umum. Prinsip ini diperkuat oleh komitmen internasional seperti Education for All dan Sustainable Development Goal (SDG) 4, yang menekankan pentingnya “pendidikan inklusif dan berkualitas untuk semua” (UNESCO, 2020). Di negara-negara berkembang, penerapan kebijakan pendidikan inklusif sering kali menghadapi kendala kompleks, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur pendidikan, dan dukungan kebijakan yang belum menyeluruh (Khoiriyah, 2024). Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kebijakan yang telah dirancang dengan praktik nyata di lapangan.

Kebijakan pendidikan inklusif di banyak negara berkembang cenderung diadopsi dari model negara maju tanpa mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya setempat (Anwar, 2025). Kondisi ini menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal adaptasi kurikulum, ketersediaan guru yang kompeten, serta penerimaan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah umum. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun kebijakan inklusif telah diterapkan, partisipasi dan hasil belajar siswa penyandang disabilitas masih rendah dibandingkan dengan siswa non-disabilitas (Adjei et al., 2024). Hal ini menandakan perlunya evaluasi yang mendalam terhadap efektivitas kebijakan yang telah berjalan, agar implementasinya tidak hanya bersifat simbolis tetapi benar-benar berdampak pada pemerataan akses dan mutu pendidikan.

Pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) menjadi metode yang relevan untuk menelaah efektivitas kebijakan pendidikan inklusif di negara berkembang secara komprehensif. Melalui SLR, berbagai penelitian sebelumnya dapat dikumpulkan, disintesis, dan dibandingkan untuk mengidentifikasi pola umum, perbedaan, serta celah penelitian yang belum terisi (Mendoza et al., 2022). Metode ini juga memungkinkan peneliti memahami sejauh mana kebijakan inklusif telah mencapai tujuannya serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Selain itu, SLR membantu memberikan dasar empiris bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan untuk memperkuat sistem pendidikan inklusif di negara-negara berkembang (Hunt et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di negara berkembang secara sistematis dan transparan. Proses penelitian dimulai dengan penentuan kata kunci seperti *inclusive education policy*, *policy evaluation*, dan *developing countries*, yang kemudian digunakan untuk menelusuri artikel ilmiah melalui mesin pencarian Google Scholar sebagai satu-

satunya sumber utama data. Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal internasional yang terbit antara tahun 2015–2025, berbahasa Inggris atau Indonesia, dan secara eksplisit membahas implementasi atau evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di konteks negara berkembang (Moher, dkk, 2009).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengelompokkan temuan penelitian berdasarkan tema-tema utama seperti efektivitas kebijakan, tantangan implementasi, serta faktor sosial dan politik yang memengaruhi keberhasilan kebijakan inklusif. Prosedur kerja penelitian ini meliputi empat tahap utama, yaitu: (1) identifikasi literatur, (2) seleksi artikel sesuai kriteria inklusi, (3) ekstraksi dan pengkodean data, serta (4) sintesis hasil dalam bentuk pola tematik yang menggambarkan kesenjangan dan kontribusi penelitian terdahulu. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas kebijakan pendidikan inklusif di negara berkembang serta rekomendasi bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang (Booth, A, dkk, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kajian *Systematic Literature Review* terhadap sepuluh penelitian tentang evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di negara berkembang menunjukkan bahwa kebijakan inklusi pendidikan telah diadopsi secara luas sebagai upaya untuk mewujudkan Education for All dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 4).

Tabel 1. Kajian *Systematic Literature Review* tentang evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di negara berkembang

No	Judul Penelitian	Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Penjelasan
1	<i>A Systematic Review of Studies of Inclusive Education Interventions in Low- and Lower-Middle-Income Countries</i>	Mendoza et al., 2022	Mengevaluasi efektivitas intervensi (guru, pelatih, model pengajaran).	Fokus lintas negara LLMIC, Menilai intervensi pendidikan, bukan kebijakan nasional spesifik.	Review sistematis yang merangkum bukti intervensi dan implikasinya bagi kebijakan implementasi
2	<i>Towards a Sustainable Future in Education: A Systematic Review & Framework for Inclusive Education</i>	Framework SLR. 2025	Menilai implementasi kebijakan terhadap SDG4 dan keberlanjutan	Mengusulkan kerangka IPOF untuk evaluasi kebijakan	Menawarkan kerangka praktis untuk menilai efektivitas kebijakan inklusi di konteks sumber daya terbatas
3	<i>A Systematic Review of Inclusive Education Strategies for Students of</i>	Oswal, 2025	Evaluasi strategi dan praktik yang mendukung inklusi (akses,	Fokus pada pendidikan tinggi bukan sekolah dasar/menengah	SLR yang mengumpulkan praktik terbaik dan tantangan di HEI, relevan untuk kebijakan lembaga

	<i>Determination (HEIs)</i>		dukungan, akademik)		
4	<i>A Systematic Literature Review of Inclusive Education in Indonesia</i>	Rante, 2020	Menilai hambatan implementasi, sumber daya, pelatihan guru, infrastruktur	Terfokus pada konteks indonesia-temuan kontekstual	SLR nasional yang mengidentifikasi gap antara kebijakan formal dan praktik di lapangan
5	<i>A Review of Indonesian Inclusive Education</i>	Rasidi, 2023	Menekankan perlunya regulasi dan dukungan administratif	Lebih banyak meninjau dokumen kebijakan dan regulasi nasional	Menyoroti perbedaan antar daerah dan kebutuhan klarifikasi regulasi
6	<i>Analysis of Inclusive Education Policy Implementation in Developing Countries</i>	Khoiriyah, 2024	Menekankan masalah adopsi kebijakan dari negara maju tanpa penyesuaian lokal	Artikel analitik/kajian literatur-membandingkan banyak negara berkembang	Temuan: banyak negara mengadopsi kerangka internasional namun gagal adaptasi lokal
7	<i>Evaluating Inclusive Education Initiatives in Indonesia: From Policy to Practice</i>	Fauziyah, 2025	Evaluasi implementasi kebijakan tingkat lokal	Studi empiris terbaru menggunakan survei & wawancara di wilayah tertentu	Menemukan disparitas pelaksanaan antar wilayah dan kebutuhan monitoring lokal
8	<i>Systematic Literature Review on Inclusive Education (Yogyakarta & Sukabumi)</i>	Zuariyah, 2025	Menyoroti kebutuhan pelatihan guru dan kolaborasi komunitas	Area studi kota spesifik menggunakan PRISMA untuk seleksi studi	SLR regional yang menilai implementasi kebijakan di dua kota dengan pendekatan PRISMA
9	<i>Contributing Factors to the Progress of Inclusive Education</i>	Cabatay et., al 2015	Menilai faktor pendorong kompetensi guru, kolaborasi, program inovatif	Fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan (bukan evaluasi kebijakan formal)	Sistesis studi yang menunjukkan faktor internal sekolah sangat menentukan hasil kebijakan
10	<i>Legal Review of Inclusive Education Policy: A Systematic Approach</i>	Kartiko, 2025	Menilai kekuatan legal dan aturan pendukung kebijakan inklusi	Penekanan pada aspek hukum dan kepatuhan regulasi nasional	Menelaah seberapa kuat kerangka hukum mendukung penerapan kebijakan inklusif.

Mendoza et al. (2022) dan Rante (2020) menyoroti bahwa kesenjangan antara kebijakan di tingkat nasional dan praktik di lapangan masih besar. Faktor utama yang menghambat keberhasilan kebijakan adalah kurangnya sumber daya, terbatasnya pelatihan guru, serta infrastruktur yang belum mendukung anak berkebutuhan khusus. Akibatnya, tujuan inklusivitas sering hanya berhenti pada tataran kebijakan tanpa disertai sistem monitoring dan evaluasi yang efektif (Mendoza, dkk, 2022).

Selain itu, berbagai studi menunjukkan bahwa pendekatan evaluasi kebijakan yang digunakan masih beragam. Beberapa menggunakan model PRISMA untuk meninjau efektivitas program dan intervensi, sementara yang lain memanfaatkan kerangka IPOF (input–process–output–feedback) untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan. Studi seperti yang diungkapkan oleh peneliti dari framework 2025 menemukan bahwa faktor input (sumber daya manusia dan dana) serta proses (pelatihan dan pendampingan guru) menjadi kunci keberhasilan (Rante, 2020). Perbedaan konteks sosial, ekonomi, dan budaya antarnegara juga berpengaruh pada hasil implementasi kebijakan inklusif. Dengan demikian, kebijakan yang diadaptasi dari model negara maju sering kali tidak efektif bila diterapkan tanpa penyesuaian terhadap kebutuhan lokal.

Lebih lanjut, hasil penelitian dari Indonesia seperti oleh Rasidi (2023), Juariyah (2025), dan Fauziyah (2025) memperlihatkan variasi pelaksanaan kebijakan antar daerah. Wilayah perkotaan relatif lebih siap dalam penyediaan fasilitas dan tenaga pendidik terlatih, sementara wilayah pedesaan masih mengalami keterbatasan sumber daya dan resistensi sosial terhadap penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus. Evaluasi di tingkat lokal menunjukkan perlunya peningkatan dukungan administratif dan pendanaan yang lebih proporsional. Selain itu, mekanisme pelibatan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan inklusif di tingkat sekolah dan daerah.

Temuan menarik juga datang dari penelitian yang menekankan dimensi hukum dan regulasi. Kartiko (2025) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan inklusif tidak hanya ditentukan oleh praktik lapangan, tetapi juga oleh kekuatan regulasi dan konsistensi penegakan hukum. Di banyak negara berkembang, kebijakan inklusif masih bersifat deklaratif tanpa sanksi atau mekanisme akuntabilitas yang jelas. Hal ini menyebabkan kebijakan sering tidak berjalan efektif meskipun sudah ada dukungan internasional dan donor pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan perlu dievaluasi tidak hanya dari sisi pelaksanaan teknis, tetapi juga dari segi komitmen hukum dan politik pemerintah.

Secara keseluruhan, *Systematic Literature Review* ini menegaskan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di negara berkembang harus bersifat holistik dan berkelanjutan. Evaluasi perlu mencakup empat aspek utama: (1) *input*-sumber daya, pelatihan, dan kebijakan; (2) *process*-implementasi dan koordinasi antar lembaga; (3) *output*-hasil jangka pendek seperti peningkatan akses dan partisipasi; serta (4) *outcome*-dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan dan kesetaraan sosial. Penelitian-penelitian yang direviu juga merekomendasikan perlunya pendekatan partisipatif dalam evaluasi kebijakan, di mana guru, orang tua, dan siswa turut menjadi bagian dari proses umpan balik. Dengan pendekatan semacam ini, kebijakan pendidikan inklusif di negara berkembang akan lebih adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan dalam menjamin hak pendidikan bagi semua anak.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* terhadap sepuluh penelitian tentang evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di negara

berkembang, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan inklusi sangat ditentukan oleh kesiapan sistem pendidikan dalam aspek sumber daya manusia, pendanaan, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Secara umum, kebijakan pendidikan inklusif di negara berkembang sudah memiliki landasan regulatif yang kuat, namun masih menghadapi tantangan dalam penerapan di lapangan, terutama terkait pelatihan guru, penyediaan sarana pembelajaran adaptif, serta keterlibatan masyarakat dan lembaga lokal. Banyak kebijakan masih bersifat normatif tanpa mekanisme evaluasi dan monitoring yang efektif, sehingga pelaksanaannya belum merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa negara-negara berkembang cenderung mengadopsi model kebijakan inklusi dari negara maju tanpa mempertimbangkan konteks sosial-budaya dan kapasitas lokal, yang berujung pada kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Untuk itu, evaluasi kebijakan perlu diarahkan pada pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy evaluation*) dengan indikator yang mencakup input, proses, output, dan outcome. Penguatan kompetensi guru, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan pendanaan menjadi kunci utama untuk memastikan kebijakan inklusif benar-benar mampu mewujudkan hak pendidikan bagi semua peserta didik. Dengan demikian, kebijakan pendidikan inklusif di negara berkembang membutuhkan evaluasi yang adaptif, partisipatif, dan kontekstual agar dapat berjalan efektif dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjei, S., Mensah, P., & Boateng, R. (2024). *Evaluating Inclusive Education Policies in Developing Contexts: A Systematic Review of Implementation Challenges and Opportunities*. *International Journal of Inclusive Education*, 28(3), 455–472.
- Anwar. (2025). *Towards a Sustainable Future in Education: A Systematic Review and Framework for Inclusive Education*.
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review (2nd ed.)*. London: SAGE Publications.
- Cabatay, M. et al. (tahun). *Contributing Factors to the Progress of Inclusive Education*. (*ejournal*).
- Fauziyah, N. (2025). *Evaluating Inclusive Education Initiatives in Indonesia: From Policy to Practice*. edupij.com
- Hunt, L., Mugo, J., & Rahman, T. (2025). *Inclusive Education Policy and Practice in the Global South: Lessons from Comparative Policy Evaluations*. *Journal of Comparative Education Policy Studies*, 37(1), 22–40.
- Juariyah, S.P. (2025). *Systematic Literature Review on Inclusive Education* (Yogyakarta & Sukabumi).
- Kartiko, A. (2025). *Legal Review of Inclusive Education Policy: A Systematic Approach*. (*IJLS*).
- Khoiriyah, U. (2024). *Analysis of Inclusive Education Policy Implementation in Developing Countries*.
- Mendoza, M. et al. (2022). *A Systematic Review of Studies of Inclusive Education Interventions in Low- and Lower-Middle-Income Countries*.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement*. *PLoS Medicine*, 6(7), e1000097.
- Oswal, N. (2025). *A Systematic Review of Inclusive Education Strategies for Students of Determination (HEIs)*. MDPI.

- Rante, S.V. (2020). *A Systematic Literature Review of Inclusive Education in Indonesia*.
- Rasidi, M.A. (2023). *A Review of Indonesian Inclusive Education*.
- UNESCO. (2020). *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education- All Means All*. Paris: UNESCO Publishing.